

**ANALISIS KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DALAM MENGAWASI BANK SYARIAH
(Studi: Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Oleh

FADHILAH AZIS
NIM:10200113028

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI ISLAM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhilah Azis
Nim : 10200113028
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 29 Februari 1996
Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1
Alamat : Perumnas Antang, Blok VI No. 4
Judul : Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi
Bank Syariah (Studi: Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 4 Februari 2018

Penyusun,

Fadhilah Azis

10200113028

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT serta salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dengan judul **“Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Bank Syariah (Studi: Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar).”** Judul ini diangkat mengingat reputasi bank syariah sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, apakah kata syari’ah yang disematkan benar-benar dijalankan dan diawasi dengan baik oleh pemegang wewenang, yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Perlu dipahami pula, jika dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang memberi kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat skripsi merupakan syarat utama meraih gelar sarjana, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Ambo Asse, S.Ag, M.Ag
2. Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang sekaligus merupakan pembimbing I Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag, M.Ag yang telah memberikan arahan dengan baik hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Pembimbing II Drs Syaharuddin, M.Si sekaligus Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Irham Muin selaku Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Syariah Ratulangi, Makassar.

5. Mukhli Sufri selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar, yang telah menjadi informan utama untuk memenuhi data-data yang dibutuhkan penulis.
6. Abd Gaffar Lewa, selaku anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Sulselbar Syariah Ratulangi, Makassar.
7. Seluruh karyawan Bank Sulselbar Syariah yang turut memberi arahan hingga penelitian penulis lakukan dengan lancar dan tanpa kendala berarti.
8. Keluarga besar UKM LIMA UIN Alauddin Makassar yang memberi dukungan dan didikan hebat selama tiga tahun terakhir.

Gowa, 4 Februari 2018

Fadhilah Azis
10200113028

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1-7
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8-40
A. Konsep Kinerja	8
1. Pengertian Kinerja	8
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja	11
3. Indikator Kinerja	13
4. Evaluasi/Penilaian Kinerja	14
B. Dewan Pengawas Syariah	15
1. Prinsip Dasar Pengawasan	15
2. Sejarah Pembentukan DPS	18
3. Kedudukan dan Wewenang DPS	19
4. Mekanisme Penetapan Keanggotaan DPS	20
5. Prinsip Pengawasan DPS	22
C. Bank Syariah	23
1. Pengertian Bank Syariah	23
2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah	24
3. Akad dalam Bank Syariah	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41-46
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Data dan Sumber Penelitian	42
D. Instrumen Penelitian	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	47-65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48

1. Sejarah	48
2. Visi & Misi Perusahaan	49
3. Produk dan Jasa Perusahaan	50
4. Struktur Organisasi Bank Sulselbar Syariah	51
5. Uraian Tugas Pokok	52
B. Gambaran Umum DPS	57
1. Sejarah DPS	57
2. Struktur Keanggotaan DPS	58
D. Mekanisme Kerja DPS di Bank Sulselbar Syariah	58
E. Efektifitas Kinerja DPS di Bank Sulselbar Syariah	62
BAB V PENUTUP	66-67
A. Kesimpulan	66
B. Implikasi	67
DAFTAR PUSTAKA	68-69
LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

ABSTRAK

Nama : Fadhilah Azis
Nim : 10200113028
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Islam/Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah (Studi: Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar)**

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Sulselbar Syariah Cabang Ratulangi, Makassar. Dua rumusan masalah yang penulis kaji yakni bagaimana mekanisme kerja, serta efektifitas kinerja DPS di perusahaan tersebut.

Ditujukan untuk mengetahui sekaligus menganalisis kinerja DPS apakah benar sesuai pada regulasi sebagai pengawas resmi bentukan MUI, pun perihal efektifitas kinerja pengawasan dalam setiap aktivitas usaha Bank Sulselbar Syariah Ratulangi, Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, merupakan metode yang melalui observasi, wawancara, juga dokumentasi guna pengumpulan data yang akurat, dengan pendekatan fenomenologi.

Hasil yang penulis dapatkan dari penelitian yakni mekanisme kerja DPS mengacu kepada sejumlah regulasi seperti peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, UU DSN tentang DPS serta tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*). Kinerja DPS pun telah sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Kinerjanya terbilang efektif, mengingat konsistensi untuk menjaga kepatuhan syariah.

Indikator efektifitas dapat dilihat dari target kerja serta prestasi yang pernah dicapai oleh bank. Pencapaian ini merupakan bukti kinerja DPS dalam mengawasi operasional perusahaan agar tetap berjalan pada lininya sebagai badan pengawas resmi. Kendati demikian, DPS pada Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar, tetap memiliki kelemahan. Kelemahan ini esensinya tidak melanggar regulasi yang ada. Hanya saja, menjadi catatan penting bahwa keberadaan DPS tetap perlu terus diperbaiki, dan dikembangkan.

Implikasi penelitian diantaranya perlu pengawasan langsung di dua kantor cabang lainnya, mengingat wewenang DPS yang harus mengawasi tiga kantor cabang, tidak begitu efektif. Selain itu, uji petik juga harus dilaksanakan lebih rutin sebagaimana DPS mengeluarkan opini syariah terhadap produk bank yang juga rutin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah sepantasnya unggul dalam penerapan sistem ekonomi berbasis Islam. Hal ini pun dinilai sebagai alternatif bagi perkembangan ekonomi nasional. Awal tahun 90-an, perbankan syariah menjadi barometer geliat Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, yang saat itu ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat.

Hal ini kemudian mendorong bank-bank konvensional untuk membentuk cabang syariah, tak hanya perbankan tapi juga *non-bank*. Pertumbuhan ini terbilang pesat utamanya saat memasuki awal 2000-an. Gerakan sekelompok masyarakat yang mendukung alternatif ini bahkan memberi peran penting dalam perkembangannya.

Maraknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, kemudian menjadi perhatian khusus pemerintah, utamanya Kementerian Agama (Kemenag). Bahwa pendirian suatu perusahaan berbadan hukum tidak hanya mesti diawasi oleh negara dengan standar konvensional yang lebih dulu ada, melainkan oleh lembaga yang berkompeten dan memiliki wewenang dalam mengawasi pelaksanaannya.

Di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS), suatu lembaga yang bertugas mengeluarkan

fatwa serta secara mutlak dalam setiap kegiatan berbasis syariah, memberi aturan, juga sanksi bagi yang melanggar.¹

Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) tentu tidak akan berjalan optimal, tanpa adanya lembaga yang bergerak dalam hal pengawasan. Apakah sistem syariah yang disematkan benar-benar berada pada porsinya, atau malah sebaliknya. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No.3 tahun 2000, dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN.

Dalam hal ini, maka DPS memiliki wewenang mengawasi secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada DSN. Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, serta merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Kinerja DPS menjadi hal penting, apakah sistem dengan landasan syariah benar dalam penerapannya. Terlebih, peran DPS selama ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap resiko reputasi suatu lembaga. Pemilihan DPS juga sudah jelas terangkum dalam sejumlah kualifikasi tertentu. Bukan sekedar mengerti ilmu keuangan secara umum namun juga mengerti hukum syari'i

¹ Komunitas Ekonomi Syariah, *Kamus Istilah Perbankan, asuransi, dan Pasar Modal Syariah Plus Zakat* (Jakarta: Shahih, 2016), h.20.

layaknya ulama dan cendekia muslim, pun aturan yang tertuang dalam fatwa syariah mesti dipahami dengan baik.

Lembaga Keuangan Syariah, tidak bisa dipungkiri rentan terhadap kesalahan atau bahkan menyimpang dari aturan. Tuntutan target hingga tingkat keuntungan yang lebih baik, menjadi alasannya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi lembaga tersebut dalam mempertahankan posisinya sebagai pelaku usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berusaha mengkaji terkait kinerja DPS dalam mengawasi pelaksanaan mekanisme kerja ataupun pelaksanaan akad pada Bank Sulselbar Syariah Ratulangi, Makassar. Kinerja yang dimaksud, tidak sekedar kemampuan kerja semata, melainkan prestasi atau hasil yang pernah dicapai DPS dalam menjalankan tugasnya.

Kinerja memiliki prinsip dasar yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, jika setiap pekerjaan yang dilakukan tentulah diawasi oleh Allah SWT.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya: Dan, katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka, Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS: 9/105)

Berdiri dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada 13 Januari 1961, Bank ini telah melalui beberapa pergantian nama. Baru pada Februari 2010 setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, ditetapkan dengan nama PT. Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

(Sulselbar). Merangkak dengan membuka Unit Usaha Syariah, membuat aset perusahaan ini terbilang pesat.’

Baik aset, dana pihak ketiga, maupun pembiayaan menjadi faktor penting meningkatnya aset Bank Sulselbar Syariah hingga 790 Milyar di tahun 2013, dan telah memiliki 39 kantor kas se-Sulselbar. Patokan ini lantas menjadi perhatian penulis, bahwa pertumbuhan aset yang sedemikian baiknya adalah bukti kepercayaan nasabah dalam setiap pelaksanaan yang berbasis syariah.²

Namun, apakah praktik di lapangan menunjukan hal yang demikian? Ataukah sistem yang tertera sudah sesuai syariat, penulis ingin lebih melihat bagaimana kinerja DPS yang selama ini dinilai punya andil besar terhadap reputasi suatu lembaga perbankan. Untuk itulah penulis mengangkat judul skripsi **“Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi pelaksanaan Bank Sulselbar Syariah Cabang Ratulangi Makassar?
2. Bagaimana efektifitas kinerja DPS dalam mengawasi Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang variabel-variabel yang diperhatikan. Definisi ini digunakan

²“Profil Bank Sulselbar” . *Situs resmi Bank Sulselbar*. <https://www.banksulselbar.co.id/>

peneliti dalam melakukan penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penafsiran yang salah atau interpretasi yang keliru antara penulis dan pembaca terhadap judul serta memperjelas ruang lingkup penelitian ini. Adapun ruang lingkup yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kinerja

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kinerja berarti sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan serta kemampuan kerja. Makna ini kemudian memperjelas, bahwa kinerja tak hanya mengindikasikan kemampuan kerja saja, melainkan prestasi apa yang pernah dicapai sebagai hasil kerja.

2. Pengawasan

Pengawasan menurut KBBI memiliki kata dasar awas, yang bermakna melihat baik-baik atau melihat dengan tajam. Maka pengawasan diartikan sebagai penilaian atau penjagaan terhadap suatu objek tertentu.

D. Kajian Pustaka

Setelah mencari berbagai referensi untuk tinjauan pustaka maka penulis menetapkan:

Skripsi karya Masliana berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah) tahun 2011. Dalam penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada dasarnya, telah melaksanakan tugas lembaga sebagaimana mestinya. Mencakup pengawas dan pemeriksaan setiap akad antara Bank BRI Syariah kepada nasabahnya. Hal ini guna menghindari terjadinya

pelaksanaan yang bertentangan dengan aturan. Namun tercatat, yang menjadi kekurangan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pengawasan yang hanya dilakukan intens pada bank pusat saja. Dengan alasan sulit menjangkau pada cabang lain, DPS dalam hal ini tak mengawasi secara menyeluruh di luar dari bank pusat

Skripsi karya Yusuf Suhendi dengan judul “Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta” tahun 2010. Penelitian ini menitikberatkan pada kredibilitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam kinerja dan kompetensinya. Perbaikan lingkungan eksternal DPS menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia (BI) sebagai regulator yaitu menciptakan mekanisme yang efektif sehingga terbentuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sehat, efisien dan sesuai syariah.

Skripsi karya Maslihati NurHidayati berjudul “Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi tentang Pengawasan Bank Berlandaskan pada Prinsip-Prinsip Islam” .Peran pengawas syariah menjadi sangat penting dalam rangka perkembangan industry lembaga keuangan Islam. Fungsi dan tanggungjawab yang dimiliki tidak hanya berkenan dengan akuntabilitas dari suatu lembaga keuangan Islam, tetapi juga dalam hal pengelolaannya yang tidak hanya dipertanggungjawabkan ke masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik segalanya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk:

- a. Mengetahui sekaligus menganalisis bagaimana kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga pengawas resmi yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- b. Efektifitas kinerja DPS dalam mengawasi Bank Sulselbar Syariah Ratulangi, Makassar. Hal ini dipandang penting, apakah pengawasan periodik hanya berdasar laporan semata, atau dengan pengawasan langsung di lokasi antara nasabah dan pihak bank.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi mahasiswa, penelitian ini tentu dapat membantu menambah wawasan dalam dua aspek sekaligus yakni, kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara menyeluruh serta mekanisme kerja pada Bank Sulselbar Syariah.
- b. Bagi masyarakat umum, karya tulis ini bisa menjadi rujukan dalam memahami kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai badan pengawas resmi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Berikut pengertian kinerja menurut beberapa ahli:

Menurut Moeheriono, kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diukur jika individu atau kelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur, yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tanpa tolak ukur keberhasilannya. Moeheriono juga menyampaikan, bahwa kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, dan sifat-sifat individu. Oleh karenanya, menurut model mitra-lawyer kinerja individu pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh faktor:

- a. Harapan mengenai imbalan
- b. Dorongan
- c. Kemampuan
- d. Kebutuhan dan sifat
- e. Persepsi terhadap tugas

- f. Imbalan internal dan eksternal
- g. Persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja

Menurut Bernardin dan Russel dan Sulistiyani, menjelaskan bahwa kinerja merupakan catatan *outcome* yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Menurut Mangkunegara, kinerja karyawan (hasil kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Simamora, kinerja karyawan merupakan tingkatan dimana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan¹.

Pengertian kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan melaksanakan tugas serta kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

- Menurut Robbins dan Rivai, kinerja diartikan sebagai fungsi dan interaksi antara kemampuan (*ability*) motivasi (*motivation*) dan kesempatan (*opportunity*), atau kinerja². Pendapat tersebut mempunyai korelasi serta saling mendukung satu sama lain antara:

¹ Rifky Mohammad Lutfy, *Pengaruh Pelatihan ISO 9001:2008 Terhadap Peningkatan Produktifitas Kerja Karyawan pada PT Spectra Samudera Line Jakarta*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan, Jakarta, 2015, h. 14

² Robbin, Stephen P, *Perilaku Organisasi Jilid II, Alih Bahasa*. (Jakarta: Prenhalindo, 1996) h.87

a. Kemampuan (*Ability*)

Menurut Thoha, kemampuan didefinisikan sebagai berikut: “Kemampuan adalah suatu kondisi yang menunjukkan unsur kematangan yang berkaitan pula dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengetahuan”. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kemampuan unsur-unsur pengetahuan dan keterampilan yang diberikan kepada setiap pegawai agar dapat bekerja dengan efektif.

b. Motivasi (*Motivation*)

Menurut Hasibuan, motivasi berasal dari kata latin “Movere” yang berarti “dorongan atau daya penggerak”, motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau apengikut. Motivasi ini penting karena diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Tingkah laku seseorang dipengaruhi serta dirangsang oleh keinginan, kebutuhan, tujuan, dan keputusannya.

c. Peluang/Kesempatan (*Opportunity*)

Menurut Robbins dalam Rivai mengatakan bahwa peluang atau kesempatan (*opportunity*) kerja ialah tingkat-tingkat kinerja yang tinggi yang sebagian merupakan fungsi dari adanya rintangan-rintangan yang mengendalikan pegawai. Meskipun seorang individu mungkin bersedia dan mampu, boleh saja ada rintangan yang menjadi penghambat. oleh sebab itu

semakin tinggi kemampuan, motivasi dan kesempatan pegawai maka akan dapat menciptakan kinerja yang tinggi pula.³

Meanwhile, Gurphet Rhandawa describes the performance as:

- a. Performance appraisal is the periodic, formal evaluation of employee performance for the purpose of making career decision.*
- b. Performance appraisal is a formal, structured system of measuring and evaluating an employee's job related behaviours and outcomes to discover how and why the employee is presently performing on the job how the employee can perform more effectively in the future so that employee, organisation and society all benefit.⁴*

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

Menurut Simamora kinerja sangat ditentukan oleh tiga hal:

- a. Faktor individual, faktor ini mencakup sejumlah aspek seperti kemampuan, keahlian, latar belakang, dan demografi.
- b. Faktor Psikologis, terdiri dari persepsi, *attitude* (kelakuan), *personality* (kepribadian), dan motivasi.
- c. Faktor organisasi ditentukan dengan sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, serta *job design*.

³Rivai, Veithzal, dan Basri. *Performance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan meningkatkan daya saing perusahaan*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005)

⁴Gurphet Rhandawa, *Human Resource Management*. (New Delhi: Atlantic, 2007) h.130

Menurut Wiliam Stem dalam Mangkunegara faktor-faktor penentu prestasi kerja individu atau pegawai adalah faktor individu dan faktor lingkungan kerja organisasinya. Pendapat tersebut dapat diasumsikan bahwa :

a. Faktor individu

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmani). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelolah dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktifitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkaris dan fasilitas kerja yang relative memadai. Sekalipun jika faktor lingkungan organisasi kurang menunjang, maka bagi individu yang memiliki tingkat kecerdasan emosi yang baik, sebenarnya tetap dapat berprestasi dalam bekrja hal ini bagi individu tersebut lingkungan organisasi itu dapat diubah dan bahkan dapat diciptakan oleh dirinya serta merupakan pemacu (pemotivator) tantangan bagi

dirinya dalam berprestasi di organisasinya prestasi kerja itu tidak hanya berkaitan dengan kuantitas tapi juga dengan kualitas pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.

3. Indikator Kinerja

Bernadin dan Sudarmanto menyampaikan ada enam kriteria dasar atau dimensi untuk mengukur kinerja antara lain:

- a. Kualitas pekerjaan (*quality*) adalah nilai dimana proses atau hasil ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Kuantitas pekerjaan (*quantity*), jumlah pekerjaan yang dihasilkan atau dilakukan, dan ditandakan seperti nilai uang, jumlah barang, atau jumlah kegiatan yang telah dikerjakan atau yang terlaksana.
- c. Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan nilai dimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, atau pada waktu yang ditentukan.
- d. Efektifitas biaya (*cost-effectiveness*) merupakan terkait dengan penggunaan sumber-sumber organisasi dalam mendapatkan atau memperoleh hasil atau pengurangan pemborosan dalam menggunakan sumber-sumber organisasi.
- e. Kebutuhan akan pengawasan (*need for supervision*) dimana pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa asistensi pemimpin atau intervensi pengawasan pimpinan.

- f. Kemampuan diri (*interpersonal impact*) terkait dengan kemampuan individu dalam meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik dan kerja sama di antara sesama pekerja dan anak buah.

4. Penilaian Kinerja

Dengan peran yang dimiliki oleh para pegawai sebuah penggerak utama bagi setiap kegiatan dalam organisasi, tentunya untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian tujuan yang telah didapat organisasi, diperlukan sebuah sistem penilaian terhadap kinerja pegawai. Hal ini merupakan suatu kegiatan yang dapat menggambarkan baik buruknya hasil sebuah organisasi dapat dilihat dengan jelas. Penilaian kinerja ini juga bermanfaat untuk organisasi agar dapat memnetukan dengan tepat apa saja yang mereka perlu perbaiki oleh organisasi tersebut.

Evaluasi kinerja atau penilain kinerja pegawai yang dikemukakan oleh Leon C. Menggisson dalam Mangkunegara penilaian prestasi kerja (*performance appraisal*) adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Menurut Soeprihanto bahwa untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang, perlu dilakukan suatu penilaian terhadap kinerja tersebut. dikatakan selanjutnya ,penilaian kinerja (*appraisal of performance*) terhadap seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya apakah telah melaksanakan tugas tersebut dengan benar atau tepat pada waktunya. Penilaian itu mencakup keseluruhan aspek, yang tidak hanya dilihat dari segi fisiknya tetapi hal yang terpenting adalah meliputi kesetiaan, prestasi kerja, prakarsa, kompetensi, tanggungjawab, ketaatan,

kejujuran, kerjasama, inisiatif dan kepemimpinan serta hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya.

Lebih jauh lagi dijelaskan oleh Soeprihanto bahwa penilaian pelaksanaan pekerjaan merupakan suatu pedoman dalam bidang personalia yang diharapkan dapat menunjukkan prestasi kerja para karyawan secara rutin dan teratur, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan karir karyawan yang dinilai maupun perusahaan atau instansi pemerintahan maupun swasta secara keseluruhan⁵.

B. *Dewan Pengawas Syariah (DPS)*

1. Prinsip Dasar Pengawasan

Di dalam Al Qur'an, telah dibahas mengenai pentingnya pengawasan, di antaranya:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS: 58/7)

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

⁵Ummi Masihtasari, *Analisis Kinerja Pegawai di Puskesmas Bongaya Makassar*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, h. 24-42

Terjemahnya: (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. (QS: 50/17)

Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, agar peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip dapat dijalankan dengan baik.

Pengawasan terhadap Bank Syariah dilakukan secara rangkap:

a. Pengawasan umum

Pengawasan umum terhadap bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia, sama seperti bank konvensional pada umumnya. Di samping itu, bank syariah diawasi pula oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pengawas bank yang bersangkutan.

b. Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus terhadap bank syariah ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang ada pada tiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan dalam memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah. Sementara Dewan Pengawas

Syariah (DPS) berkedudukan di kantor pusat bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah⁶.

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional sehari-hari lembaga keuangan syariah agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan untuk mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah harus membuat laporan (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan bank bersangkutan.

Berikut mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- a. Usulan produk
- b. Diskusi direksi bank terkait
- c. Pengajuan rancangan produk, jasa/pertanyaan
- d. Rapat DPS dengan direksi departement bagian terkait
- e. Intruksi untuk implementasi dan sosialisasi⁷

2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

⁶Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Cet.1 Gramedia Pustaka Umum, 2003, Jakarta), h.68.

⁷Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktek* (Cet.1, Gema insani pers, Jakarta, 2001), h. 31

Sekitar tahun 1990-an pemerhati dan ummat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama dengan institusi lain, terutama Bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya ialah kelahiran Bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran Bank Syariah kemudian diikuti oleh bank-bank lain, baik yang berbentuk *full branch* maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan, lembaga keuangan lainnya pun seperti Asuransi dan lembaga investasi yang berbasis syariah terus bermunculan.

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang demikian besar, MUI pada februari 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*“) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Di samping itu mereka bertugas antara lain untuk menggali, mengkaji, merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (Syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.

Oleh karena itu, struktur pengawasan dalam perbankan syariah terdiri atas hal berikut ini:

- a. Sistem pengawasan internal, yang terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan

Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan dan SKAI-Internal Syariah Review. Sistem pengawasan internal lebih bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar ada mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen

- b. Sistem pengawasan eksternal, yang terdiri atas unsur Bank Indonesia, Akuntan Publik, Dewan Syariah Nasional(DSN) dan Stake Holder. Sedangkan pengawasan eksternal pada dasarnya untuk memenuhi kepentingan nasabah dan kepentingan publik secara umum.

3. Kedudukan dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Adapun wewenangnya yaitu:

- a. Melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariat Islam
- b. Bertanggungjawab terhadap pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogram setiap tahun.
- c. Mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.

- d. Bertanggungjawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan biro syariah⁸.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah membuat dan meneliti rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian Dewan Pengawas Syariah bertugas penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

4. Mekanisme Penetapan Keanggotaan DPS

a. Keanggotaan DPS

1. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota DPS.
2. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
3. Masa tugas keanggotaan DPS adalah empat tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

b. Mekanisme Pengangkatan Calon Anggota DPS

1. Komite remunerasi dan nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada dewan komisaris.

⁸ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Cet.1, PT Elex media komputindo, Jakarta, 2016), h. 230.

2. Berdasarkan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi tersebut, dewan komisaris mengusulkan calon anggota dewan pengawas syariah kepada direksi.
 3. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi komisaris, rapat direksi menetapkan calon anggota dewan pengawas syariah untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;
 4. Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh direksi.
 5. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas calon DPS yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
 6. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud.
 7. Rapat umum pemegang saham mengangkat anggota dewan pengawas syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal pengangkatan calon anggota dewan pengawas syariah oleh rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan BI, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.
- c. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap DPS
1. Menyediakan fasilitas yang layak bagi dewan pengawas syariah antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.

2. Bank menugaskan paling kurang satu pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah.

d. Kewajiban DPS

1. Mengikuti fatwa-fatwa DSN
2. Mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketenuan dan prinsip syariah yang difatwakan DSN.
3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun⁹.

4. **Mekanisme Pengawasan DPS**

Peran DPS sebagai lembaga pengawan resmi, tentu saja berkewajiban penuh memastikan bahwa seluruh aktifitas keuangan serta penetapan strategi tidak bertentang dengan sistem syariah. Hal ini yang lantas mendasar prinsip-prinsip dalam pengawasannya yakni:

- a. *Jalbul mashalih*, yakni upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan supaya dapat terjaga lima dasar resiko dalam kehidupan yakni, resiko moral, resiko agama, resiko harta, resiko regenerasi dan resiko reputasi.
- b. *Dar'ul mafasid*, yaitu untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material.

⁹Masliana, *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Melaksanakan Pengawasan Kontrak di Bank Syariah: Studi Bank BRI Syariah*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), h. 24-25

- c. *Saddudz dzar'ah*, yaitu upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya.

Pengawasan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini. Pengawasan menyeluruh meliputi:

- a. *Riqabah musbaqah* atau pengawasan *prefentif* yang dilakukan pada tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi.
- b. *Riqabah lahiqah* atau pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah.
- c. *Riqabah a'mal* atau pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen.
- d. *Riqabash dzatiah* atau pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut¹⁰.

5. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Secara harfiah, pengertian syariah adalah jalan

¹⁰Anik Arofah, *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam terhadap Pengawasan Aspek Syariah di Baitul Mal Watamwil (BMT)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008, h.44

Allah seperti yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-sunnah. Maka sudah sepatutnya bank syariah beroperasi sesuai ketentuan Al-Qur'a dan Hadits.¹¹

Antonio dan Perwataatmadja membedakan pengertian bank menjadi dua yaitu, bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan Bank beroperasi syariah adalah yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-hadits.

Differences between an islamic bank and a conventional bank may include their ultimate goals. An islamic bank aims to follow the social requirments of the Qur'an. The relationship an islamic bank has with its clients is also different. It may offer finance via equity relationship in projects. An islamic bank is able to undertake direct investments and participate in teh management of projects. Indeed, this process can potentially help people even if they reside in developing countries with limited funds but with good projects and ideas to obtain finance. Another common financing technique is the purchase and resale agreement where the islamic bank effectively purchase and resale agreement where the islamic bank effectively purchases the product and then resells it to the client with a spesific repayment schedule including a set mark-up. The letter type of transaction is less risky than

¹¹ R Saija, Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublihs, 2016). h.109

*conventional loans, however requity financing is much more risky because of the potential for the islamic bank also to share in losses from the project.*¹²

2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah

Asas perbankan syariah menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah dalam kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Seangkan tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Fungsi bank syariah menurut Undang-Undang yakni:

- a. Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat
- b. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yang menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- d. Pelaksanaan sosial¹³.

¹²M Kabir Hassan, Mervin K. Lewis *Handbook of Islamic Bank* , (Edward Elgar Publishing, USA, 2007) , h. 96

¹³Ikut, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* , (Deepublish, Yogyakarta, 2015) , h. 44-47

3. Akad dalam Bank Syariah

Dalam melakukan suatu kegiatan muamalah, Islam mengatur ketentuan-ketentuan perikatan (akad). Ketentuan akad ini tentunya berlaku dalam kegiatan perbankan Islam. Uraian berikut ini merupakan konsep perikatan (akad) dalam hukum Islam yang dijelaskan secara umum dan singkat saja.

a. Pengertian Perikatan (Akad)

Istilah perikatan yang digunakan dalam KUH Perdata, dalam Islam dikenal dengan istilah aqad (akad dalam Bahasa Indonesia). Jumhur Ulama mendefinisikan akad adalah "pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya."

Ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Ikrar ini berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah di antara mereka.

b. Akad yang Digunakan Bank Syariah

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (tabarru')

c. Keterkaitan Akad dan Produk

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (tijarah) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (tabarru'). Akad dari transaksi tijarah yaitu: Mudarabah, salam, istishna, ijarah, ijarah wa iqtina, ujr, sharf, mudharabah, musharakah, muzara'ah, musaqah, mukhabarah. Sedangkan tabarru' yaitu: wasi'ah yad dhamamah, qardh, qarddhul hasan, wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, hibah, waqaf, shadaqah, hadiah¹⁴.

4. Jenis Akad Bank Syariah

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:

A. Akad Pola Titipan

Akad berpola titipan (Wadi'ah) ada dua, yaitu Wadi'yad Amanah dan Wadi'ah yad Damanah. Pada awalnya, bentuk yad al-amanah 'tangan amanah,' yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan yadh-dharnanah 'tangan penanggung: Aia Wadi' ah yad Dharnanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

1. Wadi'ah yad Amanah

Secara umum Wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip kepada pihak penyimpan (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan

¹⁴Widya, Karnaen, Gemala, yeni. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. cet. 2 (Jakarta: Pustaka Grafika:2006), h. 32

(mustawda') yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip.

2. Wadi'ah yad Dhamanah

Dari prinsip yad al-amanah 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip yadh-Dhamanah 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan sekaligus penjamin keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh

pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif.

Rukun dari akad titipan Wadi'ah yad Amanah. maupun yad Dhamanah) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut.

1. Pelaku akad, yaitu penitip (*mudr'/muwaddi*) dan penyimpan penerima titipan (*muda'/mustawda'*)
 2. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan
 3. *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul
- Sementara itu, syarat Wadi'ah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

1. Bonus merupakan kebijakan penyimpan
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

B. Akad Pola Pinjaman

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah Qardh dan turunannya Qardhul Hasan. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman Qardh maupun Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus Pinjaman Qardhul Hasan merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.

1. Pinjaman Qardh

Qardh merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu Barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Objek dan pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni

tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.

Rukun dari akad Qardh atau Qardhul Hasan dalam transaksi ada beberapa:

1. Pelaku akad, yaitu muqtaridh (peminjam), pihak yang membutuhkan
2. Pihak yang memiliki dana, dan muqridh (pemberi pinjaman)
3. Objek akad, yaitu qardh (dana)
4. Tujuan, yaitu 'iwad berupa pinjaman tanpa imbalan
5. *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.

Sedangkan syarat dari akad Qardh atau Qardhul Hasan yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak
2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

C. Akad Pola Bagi Hasil

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah (*trustee profit sharing*) dan musyarakah (*joint venture profit sharing*).

a. Musyarakah

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam.

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Rukun dari akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
2. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
3. *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.

b. Mudharabah

Secara singkat mudharabah atau penanaman modal ialah penyerahan modal uang kepada orang yang berdagang sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.

Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa

keuntungan yang di hasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang padai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
2. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan
3. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah terdiri dari syarat modal dan kewuntungan. Syarat modal yaitu;

1. Modal harus berupa uang
2. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
3. Modal harus tunai bukan hutang
4. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

D. Akad Pola Jual Beli

Jual beli atau perdagangan atau perniagaan atau trading secara terminologi Fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan (Santoso, 2003).

a. Murabahah

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga

barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Rukun dari akad murabahah yang ahrus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tasaman (harga)
3. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Beberapa syarat pokok murabahah menurut Usmani, antara lain sebagai berikut.

1. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
2. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
3. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan. akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, tidak boleh dimasukkan dalam harga suatu transaksi.

4. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual.

b. Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang non fungible seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek salam. Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

Rukun dari akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan muslim lainnya (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan

2. Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (muslam fihi) dengan spesifikasinya dan harga (tsaman)
3. *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.

Syarat-syarat salam antara lain sebagai berikut:

1. Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad salam ditandatangani.
2. Salam hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat.
3. Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan.
4. Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas.
5. Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.
6. Salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung.

c. *Istishna*

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam.

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *istishna* muncul. Agar

akad istishna menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam istishna pembayaran dapat di muka, di cicil sampai selesai, atau di belakang.

Rukun dari akad istishna yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
2. Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*)
3. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

E. Akad Pola Sewa

Transaksi nonbagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau ijarah. Ijarah, biasa juga disebut sewa, jasa atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.

a. Ijarah

Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:

1. Pelaku akad. Yaitu musta'jir (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan mu'jir/muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan.
2. Objek akad, yaitu ma'jur (aset yang disewakan), dan ukuran harga sewa
3. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Syarat harus dipenuhi agar hukum syaria terpenuhi.

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut teru dapat memberi manfaat kepada penyewa
3. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa
4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir.

b. Ijarah Muntahiya bittamlik

Ijarah muntahiya bittamlik adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.

F. Akad Pola Lainnya

a. Wakalah

Wakalah atau biasa disebut perwakilan, adalah perlimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain.

Rukun dari akad ini yaitu :

1. Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang membrikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa
2. Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan)
3. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat nya antara lain sebagai berikut:

1. Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan
2. Tidak bertentangan dengan syariat islam

b. Kafalah

Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung.

Rukun dari akad kafalah yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu kafil (penanggung) adalah pihak yang menjamin dan makful(ditanggung), adalah pihak yang dijamin
2. Objek akad, yaitu makful alaih (tertanggung) adalah objek penjamminan.
3. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul

Sedangkan syaratnya yaitu:

1. Objek akad harus jelas dan dapat dijamin
2. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

c. Hawalah

Hawalah adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

Rukun dari akad hawalah yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu muhal adalah pihak yang berhutang, muhil adalah pihak yang mempunyai piutang, dan muhal 'alaih adalah pihak yang mengambil alih utang-piutang
2. Objek akad, yaitu muhal bih (utang)
3. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syaratnya yaitu :

1. Persetujuan para pihak terkait
2. Kedudukan dan kewajiban para pihak

d. Rahn

Rahn adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Rukun dari akad rahn yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu rahin (yang menyerahkan barang), dan murtahin (penerima barang)
2. Objek akad, yaitu marhun (barang jaminan) dan marhun bih (pembiayaan)
3. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syaratnya yaitu:

1. Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan
 2. Penjualan jaminan
- e. Sahrf

Sahrf adalah jual beli valuta dengan valuta lain. Dimana rukunnya ialah sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu penjual adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta
2. Objek akad, yaitu sharf (valuta) dan si'rus sharf (nilai tukar)
3. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul

Syaratnya yaitu:

1. Valuta (sejenis atau tidak sejenis). Apabila sejenis, harus ditukarkan dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar
2. Waktu penyerahan¹⁵.

¹⁵Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Cet. 4. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), h 27-31

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tapi bertujuan mengungkapkan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Kualitatif bersifat deskriptif menggunakan analisis dengan pendekatan induktif¹

2. Lokasi Penelitian

Sebagaimana judul yang peneliti ambil, maka lokasi penelitian bertempat di Bank Sulselbar Syariah Cabang Ratulangi, Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam hal ini yakni fenomenologi. Pendekatan jenis ini mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Konsep fenomenologi harus mendekati objek penelitiannya dengan pikiran polos tanpa asumsi, praduga, prasangka ataupun konsep. Penelitian harus dikurung sementara

¹Eko Sugianto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Ombak; 2011), hal. 84

(*bracketing*), dan membirkan pasrtisipasi mengungkapkan pengalamannya sehingga nantinya diperoleh hakikat terdalam dari pengalaman tersebut².

Sementara menurut Creswell, pendekatan ini menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa diebut epoch (jangka waktu). Konsep ini memedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi peneliti.³

C. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

- a. Diperoleh melalui observasi langsung ke lapangan guna mengamati hal-hal yang dilakukan DPS dalam menjalankan perannya sebagai pengawas.
- b. Wawancara langsung dengan responden, berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disediakan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen atau buku untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

² Conny R. Semiawan , *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010). h. 84

³ Juliansyah Noor , *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan KARYa Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017). h. 36

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan tidak terstruktur. Berarti, alat yang digunakan untuk menanyai responden cenderung longgar, berupa topic, dan biasanya tanpa pilihan jawaban. Sebab tujuannya untuk menggali ide responden secara mendalam⁴. Berikut metode pengumpulan data:

1. Observasi

Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung di Bank Sulselbar Syariah. Mengamati kinerja DPS dalam mengawal lembaga keuangan terkait, baik akad maupun prinsip-prinsip Islam yang ada di dalamnya.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan bersifat terstruktur dengan menetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Metode wawancara bertujuan untuk mencapai data primer tentang bagaimana kinerja DPS dalam menjalankan tugasnya. Adapun informan yang diwawancara yakni Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar, Mukhlis Sufri, anggotanya Abdul Gaffar Lewa, serta Pimpinan Cabang, Irham Muin.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan peneliti sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan. Dengan tehnik kajian

⁴ Istijanto , *Riset Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 37

isi (*contentanalysis*), yaitu tehnik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara bjektif dan sistematis.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dimaksud adalah peneliti dan menggunakan alat bantu yang dipakai dalam melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan metode yang diinginkan. Adapun alat bantu yang akan penulis gunakan antara lain:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara, yaitu peneliti membuat petunjuk wawancara untuk memudahkan peneliti dalam berdialog guna perolehan data. Wawancara ini peneliti lakukan baik kepada pihak Asuransi Syariah maupun Dewan Pengawas Syariah bersangkutan.

2. Perekam Suara

Selama wawancara, penulis tentu membutuhkan alat untuk merekam hasil wawancara dengan narasumber terkait. Dalam hal ini menggunakan perekam pada seluler pribadi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data adalah digunakan untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan, melalui metode pengumpulan data yang ditetapkan. Dalam pengolahan data digunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Induktif

Metode induktif, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

2. Metode Deduktif

Metode deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Metode Komparatif

Metode komparatif, yaitu menganalisa dengan jalan membanding-bandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik kesimpulan.

Selain metode pengambilan data, adapula teknik analisis interaktif yang digunakan sebagai metode perolehan data yang valid dan sistematis, teori ini dijabarkan oleh Miles dan Huberman.⁵

1. Reduksi Data

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema, kelompok, dan pola-pola data.

⁵Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 35.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman menyatakan jika model penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Prosesnya dapat dilakukan dengan menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Kualitas data dapat dinilai melalui beberapa metode yaitu mengecek keterwakilan data, mengecek data dari pengaruh peneliti, mengecek melalui triangulasi, pembobotan bukti dari sumber terpercaya, dan membuat perbandingan.⁶

⁶ Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Cet. II; Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 104-106

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Berdiri dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara, berkedudukan di Makassar, berdasarkan Akte Notaris Raden Kalimantan di Jakarta No 95 tanggal 23 Januari 1961. Setelah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor dan setelah perubahan status dari Perubahan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) lahir Perda No.13 tahun 2003 tanggal 20 Agustus tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, dengan modal dasar Rp 690 Miliar. Akta pendirian PT berdasarkan Akta Notaris Mestrianie Habis, SH No.19 tanggal 27 Mei tahun 2004 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (PT Bank Sulsel), memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.13 tertanggal 15 februari 2005.

Bank Sulsel memiliki satu kantor pusat, tiga kantor cabang utama, 24 kantor cabang, dua kantor cabang pembantu, dan tiga kantor cabang syariah, diantaranya:

1. Cabang Syariah Sengkang yang berdiri April 2006
2. Cabang Syariah Maros berdiri pada 27 November 2007

3. Cabang Syariah Makassar 30 Desember 2008
4. Office channelling Syariah pada PT Bank Sulsel Cabang Utama Bone, PT. Bank Sulsel Cabang Bulukumba, dan PT Bank Cabang Palopo berdiri pada awal 2010

26 Mei 2011, Bank Sulsel resmi berganti nama menjadi Bank Sulselbar sehingga Bank Sulsel Cabang Syariah Makassar ikut berganti nama menjadi Bank Sulselbar Cab Syariah Makassar. Perubahan nama ini melalui keputusan Kementrian Hukum dan HAM persetujuan perubahan Anggaran Dasar (AD) ditandatangani Dirjen Administrasi Umum Aidir Amin Daud, tertuang dalam surat bernomor AHU-11765. A.A.01.02 tahun 2011 pada 8 Maret 2011. Dengan terbitnya SK tersebut, bank milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel resmi menjadi Sulselbar dengan masuknya Pemprov Sulbar sebagai pemilik saham.

2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi

“Mengikuti bank yangg terbaik di kawasan Indonesia Timur dengan dukungan manajemen yang profesional serta memberikan nilai tambah kepada Pemda dan masyarakat.”

Misi

- a. Penggerak dan pendorong laju pembangunan ekonomi daerah
- b. Pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah
- c. Salah satu sumber pendapatan asli daerah

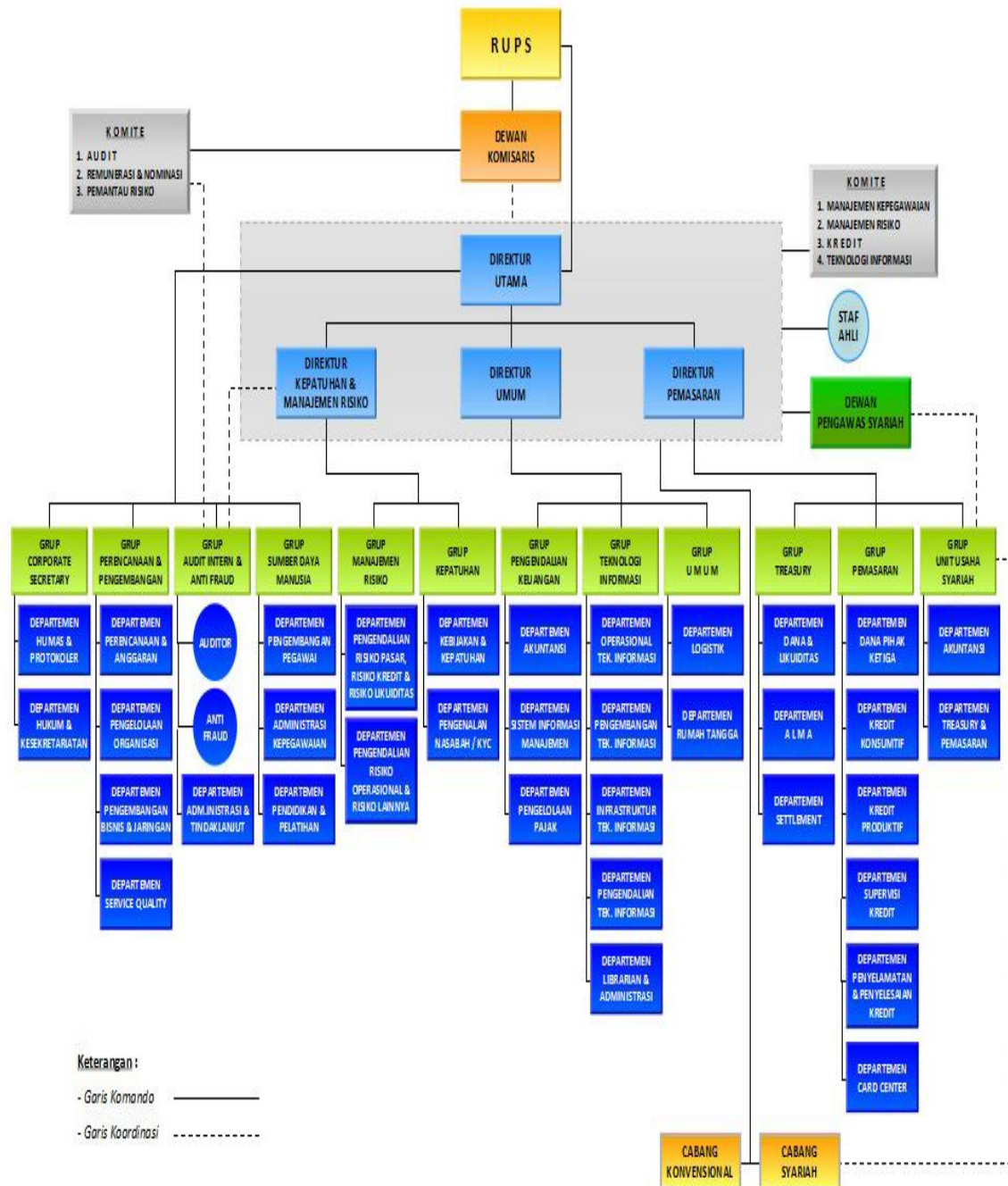
Motto

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia perbankan saat ini dan akan datang serta persaingan global, Bank Sulselbar Syariah memiliki motto “MAJU BERSAMA MERAIH BERKAH”, yang bermakna Bank Sulsel memiliki tekad untuk secara terus menerus meningkatkan kinerja dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan stakeholder dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam upaya mencapai keberhasilan bersama.

3. Produk dan Jasa Bank Sulselbar Syariah

- a. Produk Penghimpun Dana
 1. Giro
 2. Tabungan Syariah
 3. Tabungan hatam (haji dan umrah)
 4. Tabungan BKMT Syariah
 5. Deposito Murabahah
- b. Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan
 1. Piutang Murabahah investasi
 2. Piutang Murabahah modal kerja
 3. Piutang murabahah lainnya
 4. Pembiayaan Mudharabah
- c. Jasa Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar
 1. Kiriman Uang (Wakalah)
 2. Jaminan Uang (Kafalah)
 3. Pembiayaan Graha Berkah iB
 4. Modal Kerja Mitra iB

4. Struktur Organisasi Bank Sulselbar



5. Uraian Tugas Pokok

A. Pimpinan Cabang

1. Bertanggung jawab terhadap pencapaian seluruh target cabang yang ditetapkan perusahaan.
2. Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas operasional cabang, dengan melakukan supervisi terhadap unit/seksi di cabang demi pencapaian target pemasaran dan operasional sesuai ketentuan yang ditetapkan.
3. Bertanggung jawab terhadap penyaluran pembiayaan yang disalurkan melalui cabang juga melakukan *monitoring* juga pengawasan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas SDM.
5. Bertanggung jawab atas kondisi cabang agar tetap kondusif.
6. Bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah pembiayaan.

B. Kasie Umum dan Personalia

1. Montoring pegawai, membuat daftar gaji, membuat daftar uang makan, membuat surat-surat keluar, mengagendakan surat masuk.
2. Menjaga barang inventaris kantor dan membuat daftar penyusutan Aktivitas Tetap Inventaris (ATI)
3. Melaksanakan taksasi jaminan juga penagihan.
4. Memonitoring kebutuhan Alat Tulis dan Cetak (ATC)

5. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional yang telah ditetapkan oleh cabang.

C. Pimpinan Seksi Akuntansi dan Pelaporan

1. Memonitoring mutasi pada neraca dan laba rugi
2. *Me-riview* transaksi teller dan berkoordinasi dengan *teller*.
3. Memonitoring angsuran bulanan nasabah.
4. Mengedukasi dan sosialisasi perbankan syariah.
5. Memeriksa data untuk pencarian pembiayaan dan penanggung jawab (*Virtual Banking System*) VBS secara langsung.
6. Mengkonsolidasi RAK ataupun Giro antar bank dengan divisi Unit Usaha Syariah (UUS)
7. Mengkoordinasi dengan kasie umum, kasie pemasaran perihal putusan pembiayaan.
8. Menjaga stabilitas cabang dengan menjaga keharmonisan kinerja secara internal dan secara eksternal.
9. Menyampaikan laporan bulanan cabang ke kantor pusat ataupun Bank Indonesia juga anggota komite kantor cabang.
10. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan cabang, kasie akuntansi dan pelaporan SA Supervisor, head teller, penanggungjawab kunci brankas.

D. Teller

1. Transaksi tunai dan non tunai, membuat laporan kas, memonitoring posisi saldo kas untuk fungsi kontrol maka ditugaskan untuk mentransaksi *Back Office*.
2. Melayani nasabah yang akan membuka rekening.
3. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.
4. Penanggung jawab kunci kombinasi lemari brankas.

E. Customer Service (CS)

1. Bertanggung jawab atas pelayanan kepada seluruh nasabah juga menjelaskan pelbagai produk simpanan/pembiayaan kepada nasabah secara efisien dan efektif namun tetap menjaga kerahasiaan bank.
2. Memonitoring pembukaan rekening simpanan secara reguler.
3. Mengkoordinir dengan kasie keuangan dan teller perihal rekening simpanan.
4. Menjaga keharmonisan dengan seluruh bagian.
5. Meng-*update* pengetahuan mengenai produk perbankan syariah, mengawasi materi *Know Your Customer* (KYC) pada saat pembukaan rekening simpanan.
6. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.
7. Oetugas taksasi jaminan pembiayaan.
8. Memonitoring penggunaan materai.

F. Penanggung jawab VBS dan Teller Pembindah Bukuan

1. Bertanggung jawab atas transaksi non tunai *Bank Officer, Bank Office Monitoring* dan pemeliharaan Alat Tulis dan Inventaris (ATI), jaringan VBS dan pemeliharaan komputer termasuk darurat update anti virus.
2. Bertanggung jawab atas pembuatan dan pengiriman laporan Laporan Bank Umum Syariah (LBUS), Sistem Informasi Debitor (SID), mingguan, pajak-pajak termasuk mengadministrasi file pajak, petugas transaksi jaminan.
3. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan, tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.

G. SA. Administrasi Pembiayaan

1. Bertanggung jawab atas supporting pembiayaan, administrasi pembiayaan/pencarian pembiayaan, dokumentasi pembiayaan (legal file dan file pembiayaan), asuransi pembiayaan.
2. Bertanggung jawab atas pembuatan dan pengiriman laporan Sistem Informasi Debitur (SID), LBUS, mingguan.
3. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan, target tambahan yang diberikan oleh atasan langsung.

H. Kasie Pemasaran

1. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target unit sebesar Rp 38.100 milyar untuk DP dan Rp33,25 milyar untuk pembiayaan laba Rp 1M dan target operasional lainnya, yang telah ditetapkan.
2. Bertanggung jawab memantau dan melaporkan pelaksanaan pembiayaan.

3. Bertanggung jawab dalam memastikan perikatan hukum akad, tanggungan, dan FEO) secara sempurna dan memastikan kesempurnaan penutupan asuransi terhadap debitur, sosialisasi nasabah funding, sosialisasi nasabah *lending*, *monitoring* target agar tepat waktu, mengontrol kerja dan tugas AO.
4. Menagih ke nasabah juga menjaga hubungan bank antara Bank Sulsel Syariah dan nasabah maupun anggota komite.

I. Account Officer

1. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.
2. Menerima berkas permohonan pembiayaan, melakukan sosialisas terhadap permohonan yang masuk, membuat usulan pembiayaan yang dinilai layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan.
3. Membina dan mengawasi seluruh account pembiayaan yang telah disalurkan.
4. Membantu kasie pemasaran dalam pencapaian target funding.
5. Bertanggung jawab dalam proses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan pedoman produk pembiayaan Bank Sulselbar Syariah.

J. Staf Perusahaan

1. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.

2. Melakukan pencarian nasabah pembiayaan dan melunasi cepat pada *Virtual Bank System (VBS)*.
3. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan file pembiayaan dan dokumentasi taksasi jaminan menerima berkas permohonan pembiayaan, mensosialisasikan permohonan yang masuk.
4. Membuat usulan pembiayaan yang dinilai layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan.
5. Membina dan mengawasi seluruh account pembiayaan yang telah disalurkan.
6. Membantu kasie pemasaran dan pencapaian target funding

B. Gambaran Umum DPS

1. Sejarah DPS Bank Sulselbar Syariah

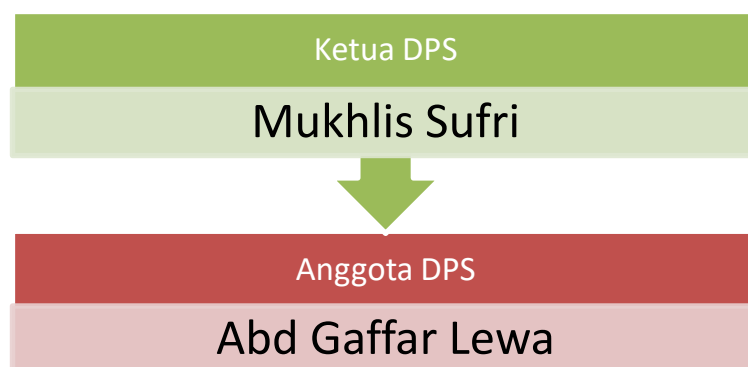
Dewan Pengawas Syariah terangkat bersamaan dengan berdirinya Bank Sulselbar Syariah pada April 2007, yang kemudian berwenang mengawasi tiga kantor cabang Unit Usaha Syariah diantaranya Makassar, Maros dan Sengkang. Sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Sulselbar berbasis konvensional, penetapan DPS diangkat langsung oleh Bank Sulselbar dengan persetujuan Bank Indonesia (BI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Di tahun 2007, Bank Sulselbar Syariah memiliki tiga Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari ketua dengan dua anggota. Prof. Dr. H. Halide sebagai ketua, serta Sanusi Baco dan Mukhlis Sufri sebagai anggota. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Prof Dr Halide yang menjabat sebagai ketua

digantikan oleh anggotanya yakni Mukhlis Sufri, dengan anggota Abd Gaffar Lewa yang menjabat sampai saat ini.

2. Struktur Keanggotaan DPS

Struktur DPS Bank Sulselbar Syariah 2017



C. Mekanisme Kerja DPS di Bank Sulselbar Syariah Ratulangi

Sebagaimana dijelaskan Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, bahwa terdapat lima mekanisme kerja DPS yakni usulan produk, diskusi direksi bank terkait, pengajuan rancangan, rapat DPS dengan direksi departemen bagian, serta intruksi untuk implementasi.¹ Pelbagai prosedur tersebut terbilang sejalan dalam praktek DPS di Bank Sulselbar Syariah Ratulangi, yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara.

Kinerja DPS di perusahaan, salah satunya mengacu pada regulasi Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), suatu praktek pengolahan perusahaan terkait etika/moral dalam menjalankan bisnis. Ketua DPS Bank

¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktek* (Cet.1, Gema insani pers, Jakarta, 2001), h.31

Sulselbar Syariah Mukhlis Sufri yang telah menjabat sejak April 2007 menerangkan, jika wewenangnya mengawasi keseluruhan operasional guna kepatuhan syariah (*syariah complaince*).

“Pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan operasional yang berkaitan dengan *syariah complaince*, tapi tidak melepaskan diri dari GCG. Diatur juga dalam undang-undang soal DPS tahun 2003. Kerja kita berpatokan pada aturan-aturan tersebut.”²

Esensinya, DPS membuat opini syariah terkait produk-produk yang dijalankan Bank Syariah. Opini syariah yang dikeluarkan mengikat pada pendapat DPS perihal tingkat kesyariaan suatu transaksi bisnis, yang berkaitan dengan produk perusahaan, dalam hal ini Unit Usaha Syariah (UUS).

“Opini syariah dibuat berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) no.36 tahun 2016. Tentang produk dan aktivitas Bank Umum Syariah (BUS). Esensinya, karakteristik produk seperti apa, ruang usaha, struktural akad dan produk, keselarasan produk, dan aturan-aturan yang dipertimbangkan Bank Indonesia.”³

Opini syariah dikeluarkan setelah kajian guna keberlanjutan akad. Dalam kajiannya, DPS bertugas memberi pertimbangan dengan mengkaji fatwa, dan dasar-dasar syariah sebelum diimplementasikan pihak bank. Hal-hal yang berkaitan dengan penerapan produk pada Bank Sulselbar Syariah dibahas pada rapat direksi maupun rapat khusus DPS. Rapat ini dilangsungkan minimal sekali dalam sebulan.

² Hasil wawancara Muchlis Sufri, Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Ratulangi (55 Tahun) 17 Oktober 2017.

³ Hasil wawancara Muchlis Sufri, Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Ratulangi (55 Tahun) 17 Oktober 2017.

Berikut mekanisme pengajuan opini syariah:

1. Bank mengajukan rancangan produk ke DPS untuk dipelajari dan dianalisa produk yang akan dikeluarkan bank syariah.
2. DPS mengadakan rapat internal untuk membahas boleh tidaknya akad dilanjutkan, dengan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan baik nasabah maupun pihak bank.
3. Rapat internal sekaligus pengesahan terhadap opini syariah yang dikeluarkan DPS.
4. Bank Syariah menjalankan produknya berdasarkan rekomendasi DPS

Mukhlis Sufri menyebut, jika tugas DPS tak sebatas mengeluarkan opini syariah yang kemudian dijalankan Bank Sulselbar Syariah saja. Tidak juga lepas tangan saat produk yang disepakati telah dijalankan.

“Akad hanya bisa dijalankan ketika ada keputusan dari DPS, pengawalannya adalah rekomendasi kita secara opini, merekomendasikan bahwa bisa, bukan dari studi kelayakan tapi dari sisi syariahnya. Tetap selanjutnya diawasi, dievaluasi lagi, *me-review* apakah konsisten menjalankan yang sudah diopinionkan, jangan sampai menghalalkan cara dan mengabaikan fatwa.”⁴

Evaluasi terhadap akad yang dijalankan bukan hanya dengan laporan/data yang diserahkan pihak bank, melainkan dengan terjun ke lokasi. Kunjungan lokasi, atau disebut uji petik dilakukan untuk mencocokkan antara laporan yang diterima, dengan fakta di lapangan. Apakah kesepakatan semasa akad dijalankan dengan benar, atau justru menyimpang dari syariat yang semestinya.

“Semisal pembiayaan, koperasi apa yang dilakukan. Harus ada rukun-rukun yang dilakukan, apakah itu prinsip-prinsip, karena pada saat evaluasi maka diminta perkembangan bisnisnya, apakah taat pada akad.”⁵

⁴ Hasil wawancara Muchlis Sufri, Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Ratulangi (55 Tahun) 17 Oktober 2017.

⁵ Hasil wawancara Mukhlis Sufri, Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Ratulangi (55 Tahun) 17 Oktober 2017.

Uji petik, menjadi tugas penting DPS lantaran evaluasi ini dijalankan bukan sekadar melihat standar kelayakan produk, melainkan menjadi pertimbangan DPS jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tak diinginkan, dan bisa saja merugikan. Sekalipun uji petik disasar untuk memastikan kesesuaian akad, nyatanya tinjauan tersebut tak sering dilakukan. Bahkan menurut Mukhlis Sufri, kunjungannya hanya sekali dalam tiga bulan, atau juga per enam bulan tergantung pada urgensi kasus.

Abd Gaffar Lewa, selaku anggota DPS turut menjelaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas usaha perusahaan dilakukan secara periodik. Sementara itu, tugas antara ketua DPS dan anggotanya tidak berbeda secara signifikan. Penetapan kedua jabatan tersebut diakui sebatas formalitas, lantaran saat bekerja ataupun rapat, keduanya tetap memiliki andil dalam memutuskan.

“Kita kolektif koligeal. Ketua dan anggota hanya formalitas tetapi yang memutuskan tetap keduanya. Putusan tidak bisa diambil kalau salah satunya tidak setuju, ketua, atau juga anggota.”⁶

Dari keterangan kedua informan, kinerja DPS di Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar merujuk kepada regulasi pemerintah maupun perusahaan itu sendiri, mencakup:

1. Peraturan Bank Indonesia
2. Undang-Undang DSN tentang DPS tahun 2003
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*)

⁶ Hasil wawancara Abd Gaffar Lewa, Anggota DPS Bank Sulselbar Syariah Ratulangi (55 Tahun) 17 Oktober 2017.

D. *Efektifitas Kinerja DPS dalam Mengawasi Bank Sulselbar Syariah Ratulangi*

Menurut Soeprihanto, untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja tersebut. Selanjutnya, penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya apakah telah melaksanakan tugas dengan benar atau tepat pada waktunya. Penilaian itu mencakup keseluruhan aspek, yang tidak hanya dilihat dari segi fisiknya tetapi hal yang terpenting adalah meliputi kesetiaan, prestasi kerja, prakarsa, kompetensi, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, inisiatif dan kepemimpinan serta hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya.

Hidayat menyebut efektifitas sebagai ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi juga efektifitasnya. Sondang P. Siagian, juga berpendapat jika efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, semakin tinggi mendekati sasaran maka makin tinggi juga efektifitasnya.⁷

Konsep lain yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja ialah efektifitas dan efisiensi. Dimana efektifitas berarti mengerjakan sesuatu yang besar, sedangkan efisiensi mengerjakan sesuatu dengan benar.⁸

⁷ Hari Sucahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar*, (Wilis, 2017, Malang), h.12.

⁸ T.Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta, BPFE,1998). Cet III, h.7

Dengan kata lain, efektifitas menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja seseorang, atau kelompok tertentu. Efektifitas dapat dinilai berdasarkan target dan standar kerja yang ditetapkan apakah tercapai selama bekerja. Semakin sedikit target yang tercapai maka semakin rendah pula efektifitasnya. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk langsung oleh Bank Indonesia sebagai badan pengawas resmi di Bank Sulselbar Syariah Ratulangi,

Dalam regulasinya, DSN menerangkan perihal tugas pokok DPS di antaranya, mengawasi secara periodik pada lembaga keuangan syariah, mengajukan usul-usul lembaga keuangan syariah kepada pimpinan terkait dan DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, serta merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.⁹

Pada pengaplikasiannya, pengawasan langsung merupakan keseharian DPS dalam menjalankan tugasnya. Sementara pengajuan usul lembaga dan perkembangan produk disusun dalam laporan kerja. Hasil kerja disusun dan diserahkan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), setiap enam bulan. Maka dalam setahun, DPS menyerahkan laporan sedikitnya dua kali. Selain kepada DSN, laporan hasil kerja juga diserahkan kepada bank induk untuk buku tahunan.

⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Konsep dan Operasional)* Cet. 1.(Jakarta: Gema Insani. 2004), h. 549

Laporan DPS, berisi perkembangan-perkembangan baru dalam aktivitas usaha perusahaan, dibuat penyampaian hasil-hasil opini, dan bisa juga berupa pendapat ulama dan usulan-usulan DPS perihal akad baru.

“Laporan dibuat berisi perkembangan baru di perusahaan, saat membuat opini juga harus dibuat penyampaian hasil opini, bahkan meminta pendapat ulama kalau saatnya ada akad baru, karena ada aktivitas bisnis yang sejatinya membutuhkan fatwa. Tapi DPS kan tidak membuat fatwa, yang buat DSN.”¹⁰

Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Syariah Ratulangi, Irham Muin. Bahwa peran DPS selama ini bukan hanya mengawasi tapi juga mengusulkan produk baru. Usulan ini dilakukan mengingat varian produk di perusahaan yang tidak banyak.

“Varian produk di bank ini masih sedikit dan terbatas, makanya kita butuh DPS untuk mengajukan usulan produk baru.”¹¹

Bank Sulselbar Syariah Ratulangi yang telah berdiri sejak tahun 2007 hingga sekarang, belum pernah melenceng dari rekomendasi opini syariah. Atau dengan kata lain, melanggar dari esensi dan regulasi perbankan syariah. Meski demikian, Mukhlis Sufri menegaskan sekalipun pelanggaran suatu saat benar terjadi, maka langkah akan diambil dengan memanggil pihak bank dan berdiskusi atas alasan pelanggaran. Jika tidak menemui jalan keluar dan tidak dapat ditangani, maka penanganan diserahkan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).

¹⁰Hasil wawancara Mukhlis Sufri, Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Ratulangi (55 Tahun) 17 Oktober 2017.

¹¹Hasil wawancara Irham Muin, Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Syariah Ratulangi (40 Tahun) 17 Oktober 2017

Prestasi kerja DPS di perusahaan dapat dinilai dengan sejumlah aspek, salah satunya dengan prestasi. Irham Muin menegaskan, jika selama ini DPS memiliki peran penting terhadap reputasi perusahaan. Hasil kinerjanya pun dapat dilihat dan dinilai cukup baik.

“Jelas, DPS punya andil besar bagi citra dan pencapaian perusahaan, prestasi yang didapat perusahaan tidak mungkin terlepas dari kinerjanya yang mengawasi kegiatan operasional kita selama ini.”¹²

Di tahun 2015, Bank Sulselbar Syariah mendapat penghargaan sebagai Best Syariah 2015 kategori Unit Usaha Syariah terbaik aset di bawah Rp 1 Triliun, yang diterima pada 19 Agustus dari Majalah Investor. Pencapaian yang demikian menjadi satu dari bukti efektifnya kinerja DPS, membawa perusahaan mampu dinilai sebagai Unit Usaha Syariah yang berpegang pada *Syariah Complaine*. Menilik sistem pengawasan dimana belum ditemukannya pelanggaran selama 10 tahun berdiri, menjadi bukti kinerja lain DPS yang patuh terhadap pelbagai regulasi yang mengikat, baik syariat Islam, pemerintah maupun perusahaan itu sendiri.

. Pada dasarnya, DPS tidak menetapkan target kerja selayaknya karyawan atau pimpinan cabang soal pendanaan juga prestasi. Melainkan dengan berpegang teguh pada kepatuhan syariah (*Syariah Complaine*), memastikan bank syariah berjalan pada lininya adalah pencapaian yang terus dipertahankan.

¹² Hasil wawancara Irham Muin, Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Syariah Ratulangi (40 Tahun) 17 Oktober 2017

Meskipun kinerja DPS efektif, namun penulis juga menemukan sejumlah kelemahan, yang walaupun tidak melanggar regulasi tapi penting diperbaiki guna perkembangan kinerja yang lebih baik.

Esensinya, suatu perusahaan membutuhkan pedoman kerja. Rujukan ini berupa panduan yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan berisi pelaksanaan kerja, untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Umumnya, berisi jam masuk kerja, jam istirahat, hari libur, pemberian cuti maupun izin. Namun sejumlah pedoman juga berisikan alternatif penyelesaian masalah yang sering terjadi dan bersifat fleksibel.

Kinerja DPS selama ini, hanya mengacu pada regulasi-regulasi terkait tanpa pedoman khusus di perusahaan tersebut. Berdasar laporan *Good Corporate Governance* Bank Sulselbar tahun 2016, tidak adanya buku pedoman justru disebut sebagai pemicu efektifitas rapat yang belum dipenuhi. Tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan, namun belum maksimal.

Kelemahan lain yakni tugas DPS yang mesti mengawasi tiga kantor cabang. Prinsip pengawasan jelas tidak sebaik pada kantor pusat karena DPS yang berdomisili di satu kota saja. Artinya, dua kantor cabang lain tidak diawasi secara langsung, hal ini turut diungkapkan Mukhlis Sufri.

“Kitakan satu organisasi, satu kesatuan, makanya DPS bertugas memantau semuanya. Ada yang melalui berkas, ada yang datang langsung di kantor kadang per enam bulan kadang per tiga bulan.”¹³

¹³ Hasil wawancara Mukhlis Sufri Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Ratulangi (55 Tahun) 17 Oktober 2017

Meski tidak melanggar aturan, namun keterbatasan pengawasan di sejumlah kantor cabang tidak bisa menjamin sepenuhnya pelanggaran yang bisa saja terjadi. Terlebih, kehalalan produk bank syariah tergantung pada kontrol DPS yang maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja DPS telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Sulselbar Syariah Ratulangi, mengacu pada sejumlah regulasi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang DSN, serta *Good Corporate Governance* (GCG). Pada dasarnya, akad yang dilaksanakan pihak bank tidak bisa berjalan tanpa ada persetujuan dari DPS melalui opini syariah. Saat pembiayaan DPS tidak lepas tangan, melainkan mengevaluasi dengan uji petik untuk melihat kesesuaian akad dan praktek di lapangan.
2. Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar terbilang efektif. Di samping karena taat terhadap regulasi DSN, DPS juga terus menjaga *Syariah Complainece*, sebagaimana mestinya. Tugas DPS yang dibebankan DSN seperti pengawasan periodik, mengajukan usul lembaga, melaporkan perkembangan produk, dan merumuskan permasalahan telah dijalankan dengan baik.

B. Implikasi

Dari kesimpulan tersebut, penulis memaparkan sejumlah saran yang dianggap perlu untuk diketahui:

1. Sekalipun kinerja DPS di Bank Sulselbar Syariah Ratulangi terbilang efektif. Namun pengawasan di ketiga kantor cabang sekaligus penulis nilai kurang. Sebagaimana pengertian pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti melihat dengan jelas, hal inilah yang tidak relevan. Mengawasi dari jarak jauh kedua kantor cabang dan hanya berdasar laporan atau pertemuan sekali dalam beberapa bulan tidak mungkin maksimal. Untuk itulah penulis kira perlu ada pengawasan di kantor cabang yang demikian untuk memaksimalkan kinerja, agar tak ada penyimpangan perihal syariat.
2. Uji petik yang dilakukan hanya sekali dalam tiga atau enam bulan kurang efektif. Pelaksanaan akad yang rutin pada bank syariah seharusnya dibarengi dengan uji petik yang rutin pula. Hal ini guna menghindari hal yang tak diinginkan serta melanggar dari akad yang ditetapkan sebelumnya.

KEPUSTAKAAN

- Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Cet.1, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Anik Arofah, *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam terhadap Pengawasan Aspek Syariah di Baitul Mal Watamwil (BMT)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Cet.4, Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III, Bandung: Alfabeta, 2011
- Eko Sugianto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Gurpheet Rhandawa, *Human Resource Management*, New Delhi: Atlantic, 2007.
- Hari Sucahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar*, Malang: Wilis, 2017.
- Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Komunitas Ekonomi Syariah, *Kamus Istilah Perbankan, asuransi, dan Pasar Modal Syariah Plus Zakat*, Jakarta: Shahih, 2016.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Konsep dan Operasional)* Cet. 1 Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Masliana, *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Melaksanakan Pengawasan Kontrak di Bank Syariah: Studi Bank BRI Syariah*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- M Kabir Hassan, Mervin K. Lewis *Handbook of Islamic Bank*, USA: Edward Elgar Publishing, 2007.

- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Pawito .*Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Cet. II, Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Profil Bank Sulselbar. *Situs resmi Bank Sulselbar*.
<https://www.banksulselbar.co.id/page/sejarah-singkat>
- Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003.
- Rifky Mohammad Lutfy, *Pengaruh Pelatihan ISO 9001:2008 Terhadap Peningkatan Produktifitas Kerja Karyawan pada PT Spectra Samudera Line Jakarta*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan, Jakarta, 2015.
- Rivai,Veithzal, Basri. *Performance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan meningkatkan daya saing perusahaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Robbin, Stephen P, *Perilaku Organisasi Jilid II, Alih Bahasa*. Jakarta: Prenhalindo, 1996.
- R Saija, Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah:dari teori ke praktek*, Cet.I Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- T.Hani Handoko, *Manajemen*, Cet III, Yogyakarta, BPFE,1998.
- Umni Masihtasari, *Analisis Kinerja Pegawai di Puskesmas Bongaya Makassar*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.
- Widya, Karnaen, Gemala, Yeni. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cet. 2 Jakarta: Pustaka Grafika, 2006.

DOKUMENTASI



Sesi wawancara dengan Abd Gaffar Lewa (kanan) dan Mukhlis Sufri (tengah), saat menjelaskan mekanisme kerja DPS, di lantai dua Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar. Selasa (17/10/2017)



Tampak Mukhlis Sufri (kiri) dan Abdul Gaffar Lewa (kanan) saat mennyimak pertanyaan dari peneliti pada sesi wawancara, bertempat di lantai dua Bank Sulselbar Syariah Ratulangi, Makassar. Selasa (17/10/2017)

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Mukhlis Sufri

Jabatan : Ketua DPS BPD Syariah Ratulangi

1. Sejak kapan anda menjabat sebagai Ketua DPS di BPD Syariah?
2. Apa-apa saja yang diawasi DPS di BPD Syariah?
3. Bagaimana mekanisme kerja khusus sebagai ketua DPS?
4. Apakah hanya di Bank pusat atau cabangnya?
5. Jika ditemukan pelanggaran, bagaimana tindakan DPS selanjutnya, baik pelanggaran berat, ataupun ringan?
6. Sejauh mana keterlibatan DPS dalam mengawal setiap akad di BPD?
7. Adakah prestasi kerja yang pernah dicapai DPS selama mengawasi BPD?
8. Di tiap tahunnya, apa target kerja dari DPS itu sendiri?

Nama : Abd Gaffar Lewa

Jabatan : Anggota DPS

1. Sejak kapan anda bekerja sebagai anggota DPS di BPD Syariah?
2. Apa tugas dari anggota DPS dalam pengawasan BPD?
3. Sejauh mana keterlibatan DPS dalam mengawal setiap akad pada BPD?
4. Bagaimana bentuk kerjasama antara anggota dan ketua DPS dalam pengawasan?

Nama : Irham Muin

Jabatan : Pimpinan Cabang

1. Sejak kapan BPD diawasi resmi oleh DPS?
2. Bagaimana mekanisme kerja DPS?
3. Berpengaruhkan kinerja DPS terhadap reputasi perusahaan di mata nasabah?
4. Sejauh mana keterlibatan DPS dalam mengawal setiap akad pada BPD?
5. Ketika terjadi pelanggaran, bagaimana tindak lanjut pihak BPD dan perusahaan?
6. Adakah prestasi kerja yang pernah dicapai DPS selama ini?
7. Dari 1-10, bagaimana penilaian anda terhadap kinerja DPS?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Lempo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 7047/EB.1/PP.00.9/2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Undangan Ujian Munaqasyah

Samata, 24 November 2017

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Fadhillah Azis
NIM : 10200113028
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : "Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Bank Syariah (Studi pada Bank Sulselbar Syariah Ratulangi)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 27 Nopember 2017
Waktu : 14.00-16.00 Wita
Tempat : L. 206

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah (Studi: Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar)*", yang disusun oleh **Fadhilah Azis** NIM: **10200113028**, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 13 Desember 2017 M
23 Rabiul Awal 1439H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
Sekretaris : Dr. Abdul Wahab, S.E, M.Si
Munaqisy I : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag
Munaqisy II : Prof. Dr. Mukhtar Luthfi, M.Pd
Pembimbing I : Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Syaharuddin, M.Si

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIIN Alauddin Makassar,**

(.....)
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1490 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif **Fadhiliah Azis : NIM: 10200113028**
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

Ketua	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Sekretaris	: Sukmawati, S.Ag.
Penguji Dirasah Islamiyah	: Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.
Penguji Dasar Ekonomi Syariah	: Drs. Thamrin Logawali, MH.
Penguji Keuangan dan Perbankan Syariah	: Dr. Rahmawati Muin, M.Ag.
Pelaksana	: Muhammad Irfan Mas'ud
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 03 Oktober 2017
Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13218/S.01P/P2T/08/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Pimpinan PT. Bank Sulselbar Syariah
Cab. Ratulangi Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 4899/EB.I/PP.00.9/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **FADHILAH AZIS**
Nomor Pokok : 10200113028
Program Studi : Ekonomi Islam
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM MENGAWASI BANK SYARIAH (BANK SULSELBAR SYARIAH RATULANGI) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 September s/d 11 November 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 30 Agustus 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

Nomor : 4041/EB.I/PP.00.9/2017
Lampiran :
Hal : **Undangan Seminar Proposal**
A.n. Fadhilah Azis/10200113028

Samata, 23 Agustus 2017

Kepada Yth:

1. **Dr. Rahmawati Muin, M.Ag.** Sebagai Pembimbing I
2. **Dr. Syaharudin, M.Si.** Sebagai Pembimbing II

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

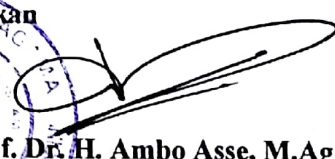
Bersama ini kami mengundang bapak, untuk menghadiri seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku pembimbing pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Agustus 2017
Waktu : 09.00 - Selesai
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Bank Syariah (Studi pada Bank Sulselbar Syariah Ratulangi)
Tempat : Ruang L.101

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalam,

Dekan


Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002



Catatan:

1. SK Pembimbing Draft Skripsi Terlampir
2. Pembimbing diharapkan hadir

RIWAYAT HIDUP



FADHILAH AZIS, lahir di Ujung Pandang pada 29 Februari 1996. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Muhammad Azis dan Sahriah. Pernah menempuh pendidikan di SDN 67 Rappokalling Makassar lulus tahun 2007 , Madarasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Makassar lulus pada 2010, SMA IT Wahdah Islamiyah Makassar lulus pada 2013, selanjutnya menempuh pendidikan di perguruan tinggi yakni UIN Alauddin Makassar Jurusan Ekonomi Islam dan lulus pada tahun 2017. Semasa kuliah aktif di sejumlah organisasi intra seperti UKM LIMA pada tahun 2014 hingga 2017, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) tahun 2016.